

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA KORUPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH

Oleh:

Laily Rahmawati*

Maslichah**

M. Cholid Mawardi***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

lailyrahmawati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the corruption of local government officials. The population in this study were Malang city government employees. Samples used. The technique used in sampling is purposive sampling technique, the sample chosen was 139 respondents. Data was taken using the questionnaire method. The data analysis method used is multiple regression analysis with the help of SPSS version 16 software (Product Statistics and Solution Services version 16). The test data used is the simultaneous hypothesis test (f), determination coefficient (R²), and partial hypothesis test (t). The results of the study indicate that simultaneously the independent variables significantly influence the dependent variable. Based on the test results of the coefficient of determination, the adjusted R value is 87.9% while the remaining 12.1% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of partial tests of individual behavior variables have a positive effect on criminal acts of corruption, government organizations have a negative influence on corruption, per law has a positive effect on criminal acts of corruption, supervision has a positive effect on corruption.

Keywords: individual behavior, government organization, by law, supervision

PENDAHULUAN

Setelah zaman reformasi berakhir serta mulai diterapkan sistem otonomi daerah melalui UU no. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (dan lebih lanjut diganti UU No. 32 / 2004 dan UU No. 23 / 2014), mulai timbul kasus korupsi dikalangan pejabat yang mulai tahun 2004 hingga 2015 sebanyak 343 kepala daerah menurut keterangan dari Kementerian Dalam Negeri (*Kompas*, 4 Februari 2015). Hal ini membuktikan jika sistem otonomi daerah menunjukkan konsekuensi yang tidak jelas, disisi lain daerah diberi wewenang lebih sehingga lebih *flexible* serta tanggap dalam pelayanan publik. Namun akibat buruknya membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi dianggap telah membuahkan hasil karena telah ada upaya tindakan dalam memberantas korupsi. Namun mirisnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik seperti: “Mengapa para pejabat daerah itu terjerat kasus korupsi? Apakah mereka kekurangan secara ekonomi sehingga terpaksa harus menerima suap atau mengambil uang negara bagi dirinya, keluarganya, maupun kelompok tertentu dengan jalan yang tidak legal? Ataukah ini berkaitan dengan kultur yang lebih luas, sehingga terjadinya kasus korupsi para pejabat ini adalah akibat adanya tekanan sosial-politik yang tidak mampu mereka kendalikan? Apakah hal ini disebabkan karena cacatnya sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang menyebabkan mereka terjebak dalam sistem itu? Ataukah hal ini berkaitan dengan masalah moral masing-masing individu pejabat?”.

Bauhr dan Nasiritousi menyatakan ada dua hal yang memicu korupsi terjadi yaitu karena ada kebutuhan (*corruption by need*), dan karena sikap rakus untuk menumpuk kekayaan (*corruption by greed*). Sebenarnya setiap pribadi tidak berniat untuk melakukan korupsi akan tetapi peraturan yang ruwet, sistem administrasi yang tidak teratur, susunan yang terlampaui kaku pada organisasi, serta luasnya tugas memaksa mereka untuk tidak bersikap jujur dan bersih. Contoh nyatanya adalah kasus korupsi Walikota Malang Mochammad Anton dalam kasus Suap APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.

Yosafat (2015) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia tahun 2011-2014 Sembilan negara Asia tersebut adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea selatan, Hongkong, Jepang dan China. Variabel yang digunakan adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang bersumber dari *Transparency International*, Produk Domestik Bruto (PDB, per kapita konstan tahun 2011) dan Impor (IMP, konstan tahun 2005) yang bersumber dari *Word Bank*”. Dalam penelitian yang dilakukannya menggunakan metode analisis *Fixed effect*. Hasil estimasi yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel impor mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan basis negara di Indonesia hal ini karena melihat negara Indonesia yang mempunyai tingkat korupsi paling tinggi dibandingkan dengan negara Asia yang lain pada tahun 2014

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah”**

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perilaku individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Apakah perilaku individu berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi ?
3. Apakah organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi?
4. Apakah peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi ?
5. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perilaku individu, organisasi pemerintahan, peraturan, perundang-undangan , dan pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis perilaku individu berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi
4. Untuk menganalisis peraturan perundang–undangan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi
5. Untuk menganalisis pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi terutama dampak negatif korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui dampak dari korupsi dan faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi.

KERANGKA TEORITIS

Korupsi

Menurut *World Bank* “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Jenis jenis korupsi

Menurut Alatas (1987:39) terdapat beberapa jenis yang berlainan dalam korupsi dari segi tipologi antara lain:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), merujuk kepada adanya persetujuan timbal balik antara pemberi dan penerima, untuk kemaslahatan kedua pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), merujuk pada pencegahan kerugian yang dapat mengancam dirinya melalui paksaan pada pelaku untuk melakukan suap.

3. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), merupakan penunjukan yang tidak sah terhadap sanak saudara dan teman yang dimilikinya untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang ada.

Dampak dari tindakan korupsi

Menurut Sulistyantoro (2004) “Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat”.

Faktor penyebab korupsi

Menurut UU NO 12 tahun 2001. Korupsi adalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Berikut merupakan aspek-aspek korupsi yaitu:

1. Aspek Perilaku individu

Jika ditelaah dari sisi pelaku korupsi penyebab ia melakukan korupsi berupa keinginan dalam dirinya sadar untuk melakukan serta dorongan niat.

2. Aspek Organisasi Pemerintahan

Dalam arti luas organisasi mengandung sistem organisasi lingkungan masyarakat. “Organisasi yang biasanya menjadi korban dari korupsi seringkali memberi andil terhadap adanya tindak korupsi karena membuka peluang untuk terjadinya sebuah korupsi” (Tunggal, 2000).

3. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Terdapatnya kelemahan dalam perundang-undangan menyebabkan mudahnya timbul tindak korupsi yang antara lain: “(a) peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan beberapa pihak seperti kerabat atau “dulur-dulur” dari presiden sendiri, (b) kualitas aturan perundang-undang yang kurang cukup, (c) kurangnya sosialisasi terkait peraturan, (d) ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi, (e) adanya ketidak konsistenan serta pandang bulu dalam penerapan sanksi, (f) bidang revisi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang masih lemah.

4. Aspek Pengawasan

Pengendalian merupakan sebuah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, supaya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada dalam rencana. Pengendalian dan pengawasan ini merupakan bagian penting manusia memiliki keterbatasan baik dalam hal pengetahuan, kemampuan, perhatian dan juga waktu yang dimilikinya.

Faktor faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia

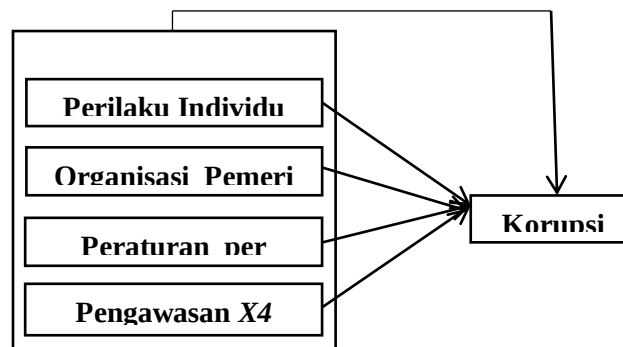
. Dimana dalam perkembangan zaman atau di era globalisasi ini merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan terhadap setiap individu pun akan semakin meningkat. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi.

Korupsi dan pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan teori Sheifer dan Vishny (1993 :148), “menyatakan misalnya, ketika sebuah proyek perlu mendapat izin dari banyak orang, dimana masing-masing mempunyai kekuasaan untuk memveto, maka biaya korupsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun”. Myrdal (1968) mengatakan bahwa “pejabat yang korupsi bisa menggunakan kekuasaannya untuk menunda dan menghalangi suatu proyek sehingga dia bisa mendapatkan suap yang lebih banyak”.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari uraian landasan teori diatas yang terdapat dalam tinjauan pustaka, maka model kerangka konseptual yang digunakan adalah:



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan tinjauan teori diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Perilaku Individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

H_{1a} : Perilaku individu berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

H_{1b} : Organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

H_{1c} : Peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

H_{1d} : Pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah (*scientific*) karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kota Malang, Jalan Tugu No. 1 Kiduldalem Malang. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Mei 2019

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintah Kota Malang. Dalam pengambilan sampel ini melibatkan keputusan pemilihan desain dan ukuran. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling*". Dasar penentuan *purposive sampling* ini adalah tujuan penelitian". Kriteria pengambilan sampel dalam

penelitian ini yaitu pegawai pemerintahan yang ada di kota Malang Berikut merupakan perhitungan sampelnya, menurut Slovin (1960):

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

n = sampel

N = populasi

d = batas toleransi kesalahan

Definisi Variabel dan Pengukuran

1. Aspek Perilaku individu

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi masing-masing responden yang terdiri dari 7 item pertanyaan dengan menggunakan instrumen Sulistyantoro (2004) dan dari setiap pertanyaan digolongkan dalam 5 kategori pilihan jawaban yaitu terdiri dari sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju:

Tabel 3.1 Indikator Perilaku Individu

No	Variabel	Pertanyaan
1	Perilaku Individu (X1)	Sifat tamak yang dimiliki seseorang membuat dirinya melakukan tindak pidana korupsi
2		korupsi dikarenakan moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan
3		Seseorang yang tergoda untuk melakukan korupsi disebabkan penghasilan yang diperoleh kurang mencukupi terhadap kebutuhan hidup yang wajar
4		Karena adanya kebutuhan hidup individu yang sangat mendesak, seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi
5		Korupsi disebabkan karena gaya hidup yang konsumtif dan bermewah-mewahan
6		Seorang korupsi karena malas-malasan untuk bekerja
7		Kurangnya menerapkan ajaran agama dengan benar mengakibatkan seseorang berani melakukan tindak pidana korupsi

2. Aspek Organisasi Pemerintahan

3. Tabel 3.2 Aspek Organisasi Pemerintahan

No	Variabel	Pertanyaan
1	Organisasi Pemerintahan (X2)	seorang pimpinan kurang memberikan teladan yang baik menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi
2		korupsi terjadi karena tidak adanya kultur pemerintahan yang benar
3		kurangnya sistem akuntabilitas yang memadai sehingga membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi
4		manajemen yang tidak transparansi dan cenderung menutupi korupsi yang ada di daerah
5		terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya birokrasi yang panjang dan berbelit belit
6		terdapat pelayanan publik yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi
7		korupsi dikarenakan lemahnya sistem pengendalian instansi pemerintah

4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

5. Tabel 3.3 Aspek peraturan Perundang - Undangan

No	Variabel	Pertanyaan
1	Peraturan perundang-undangan (X3)	Adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik serta menguntungkan kerabat sendiri menjadi peluang terjadinya korupsi
2		Kurangnya kualitas perundang-undangan yang memadai menyebabkan terjadinya korupsi
3		kurangnya sosialisasi undang-undang memberikan seseorang untuk melakukan korupsi
4		sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat ringan
5		penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu
6		lemahnya bagian revisi dan evaluasi perundang-undangan membuat korupsi semakin tinggi
7		Tidak ada peraturan daerah mengenai kebebasan informasi dan tata cara penyampaian atas aspirasi memberikan peluang seseorang melakukan korupsi

6. Aspek Pengawasan

7. Tabel 3.4 Indikator Variabel Pengawasan

No	Variabel	Pertanyaan
1	Pengawasan (X4)	lemahnya pengawasan dari masyarakat
2		terjadi korupsi karena lembaga pengawas yang tidak independen
3		lemahnya pengawasan dari sebuah partai , membuat pejabat melakukan korupsi
4		lemahnya media dalam memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan
5		tidak adanya mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak terkait saat terjadi korupsi
6		adanya korupsi akibat lemahnya DPRD dalam mengawasi eksekutif
7		lembaga peradilan yang tidak independen menjadikan pejabat melakukan korupsi

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian adalah data primer. Data primer didapat melalui kuesioner karyawan di Pemerintah Kota Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuesioner (angket). Pengumpulan data menggunakan penyusunan daftar-daftar pertanyaan atau pernyataan berbentuk tertulis dan diberikan terhadap responden sampel yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yaitu metode kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y=Korupsi

a = Konstan

b_n= Parameter Koefisien Regresi

X₁= Perilaku Individu

X₂= Organisasi Pemerintahan

X₃= Undang-undang

X₄= Pengawasan

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 4.1
Kelompok sampel Berdasarkan kriteria

No	Kriteria sampel	Jumlah perusahaan
1	Jumlah Kuesioner yang disebar pada Kantor Pemerintahan	171
2	Jumlah Kuesioner Kembali	158
3	Jumlah kuesioner yang memiliki data tidak lengkap	(13)
Jumlah sampel		139

Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PI	139	1	5	4,207	0,895
OP	139	2	5	4,186	0,924
PU	139	1	5	4,239	0,938
PENGAWASAN	139	1	5	4,206	0,877
TPK	139	1	5	4,337	0,880
Valid N (listwise)	139				

Uji Validitas

Tabel 4.3
Uji Validitas

variabel	KMO	Keterangan
Perilaku Individu	0,535	Valid
organisasi pemerintahan	0,525	Valid
peraturan perundang-undangan	0,635	Valid
Pengawasan	0,571	Valid
tindak pidana korupsi	0,771	Valid

Dalam pengujian uji validitas menggunakan. *Indeks Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy*. Didapatkan hasil nilai KMO Lebih besar dari 0,5 Dengan nilai signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis faktor tepat digunakan untuk menyederhanakan kumpulan 5 variabel tersebut.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas

variabel		<i>Alfa Cronbach</i>	Keterangan
Perilaku Individu		0,525	Reliabel
organisasi pemerintahan		0,618	Reliabel
peraturan perundang-undangan		0,568	Reliabel
Pengawasan		0,769	Reliabel
tindak pidana korupsi		0,575	Reliabel

hasil pengujian reliabilitas data Perilaku Individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, pengawasan dan tindak pidana korupsi dikatakan reliabel serta dalam penelitian bisa dimanfaatkan untuk alat ukur yang digunakan. Nilai *cronbach's alfa* memiliki nilai > dari 0,3 - 0,6 maka data reliabel dan bisa digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 4.5
Uji Normalitas

		PI	OP	PU	PENGAWAS AN	TPK
N		139	139	139	139	139
Normal	Mean	29,4676	29,3093	29,676	29,45324	51,7050
Parameters(a,b)		3	5	26		4
	Std.	2,67652	2,81777	3,1627	2,743168	4,27573
	Deviation	7	2	72		7
Most Extreme	Absolute	,131	,129	,174	,126	,114
Differences						
	Positive	,131	,076	,109	,105	,080
	Negative	-,091	-,129	-,174	-,126	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		1,145	,816	1,050	,683	1,348
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087	,120	,090	,425	,053

Berdasarkan tabel hasil pengujian normalitas di atas diperoleh informasi bahwa data semua variabel memiliki nilai probabilitas > *level of significance* ($\alpha=5\%$) maka data semua variabel dinyatakan berdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

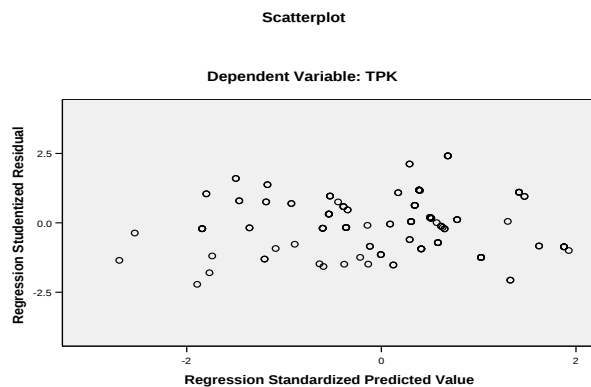
Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,637	1,878			
	PI	,185	,062	,116	,577	1,734
	OP	-,198	,068	-,130	,431	2,320
	PU	,433	,071	,321	,316	3,169
	PENGAWA	1,173	,053	,752	,751	1,331
	SAN					

Pada tabel di atas memperlihatkan nilai *Tolerance* > 0,10 (lebih besar) yang artinya tidak terjadi korelasi antar *variabel* independen. Nilai VIF < 10 (kurang dari 10). Maka dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Grafik Scatter-plot



Berdasarkan pada gambar 4.1 memperlihatkan adanya titik-titik yang tersebar dengan acak dan tidak berbentuk pola tertentu. Dengan demikian uji di atas menunjukkan bahwa model tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F).

Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai uji F hitung adalah 252,435 dengan Sig F 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dalam hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Perilaku Individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengawasan berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi, maka dari itu H_1 Diterima.

1. Uji koefisien Determinasi (*R Square*)

Dari uji koefisien determinasi diketahui bahwa *Adj R Square* sebesar 0,879. Hal ini berarti sebesar 87,9% terhadap tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh variabel Perilaku Individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Sedangkan sisanya sebesar 12,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,637	1,878		2,470	,015
	PI	,185	,062	,116	2,980	,003
	OP	-,198	,068	-,130	-2,894	,004
	PU	,433	,071	,321	6,091	,000
	PENGAWASAN	1,173	,053	,752	22,058	,000

Sumber data diolah peneliti 2019

Berdasarkan uji secara parsial yang terdapat pada tabel di atas maka dihasilkan keterangan sebagai berikut :

$$\text{TPK} = 4,637 + 0,185 \text{ PI} - 0,198 \text{ OP} + 0,433 \text{ PU} + 1,173 \text{ Pengawasan} + e$$

- Hasil uji variabel Perilaku Individu memiliki nilai t sebesar 2,980 dengan nilai *Significant* sebesar 0,003 ($0,0030 < 0,05$) Maka H_1 diterima. Nilai *significant* < *Alpha* menunjukkan bahwa secara parsial Variabel Perilaku Individu berpengaruh Positif terhadap Tindak pidana korupsi. Nilai konstanta (B) menunjukkan nilai sebesar 0,185(Positif) yang berarti jika nilai Y sama dengan 0, Maka nilai Perilaku Individu akan menunjukkan Kenaikan sebesar 0,185.
- Hasil uji variabel Organisasi Pemerintahan dengan nilai t -2,894 dengan dan *Significant* 0,004 ($0,004 < 0,05$) Maka H_1 diterima. Nilai *significant* < *Alpha* menunjukkan bahwa secara parsial variabel Organisasi Pemerintahan berpengaruh Negatif terhadap tindak pidana korupsi. Nilai konstanta (B) Menunjukkan nilai sebesar -0,198(negatif) yang berarti jika nilai Y sama dengan 0, Maka nilai Organisasi Pemerintahan akan menunjukkan penurunan sebesar 0,198.
- Hasil uji variabel peraturan perundang-undangan memiliki nilai t sebesar 6,091 dengan nilai *Significant* ialah 0,000 (lebih kecil dari 0,05) maka dalam hal ini H_1 diterima. Nilai *significant* < *Alpha* menunjukkan bahwa secara parsial variabel perundang-undangan berpengaruh Positif terhadap Tindak pidana korupsi. Nilai konstanta (B) Menunjukkan nilai sebesar 0,433(Positif) yang berarti jika nilai Y sama dengan 0, Maka nilai perundang-undangan akan menunjukkan Kenaikan sebesar 0,433.

4. Hasil uji variabel Pengawasan memiliki nilai t sebesar 22,058 dengan nilai *Significant* adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05) maka dalam hal ini H_1 diterima. Nilai *significant* < *Alpha* menunjukkan bahwa secara parsial Variabel Pengawasan berpengaruh Positif terhadap tindak pidana korupsi. Nilai konstanta (B) Menunjukkan nilai sebesar 1,173 (Positif) yang berarti jika nilai Y sama dengan 0, Maka nilai Pengawasan akan menunjukkan Kenaikan sebesar 1,173.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan Perilaku Individu, organisasi pemerintahan, pengawasan dan UU memiliki pengaruh terhadap tindak pidana korupsi.
Hasil uji secara parsial Variabel Perilaku Individu berpengaruh Positif terhadap Tindak pidana korupsi.
2. Hasil uji secara parsial Variabel Organisasi Pemerintahan berpengaruh Negatif terhadap Tindak pidana korupsi
3. Hasil uji secara parsial Variabel perundang-undangan berpengaruh Positif terhadap Tindak pidana korupsi
4. Hasil uji secara parsial Variabel Pengawasan berpengaruh Positif terhadap Tindak pidana korupsi

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak keterbatasan yang ada di dalam peneliti ini. Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan yang ada di kota Malang sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan.
2. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku individu, organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengawasan.
3. Metode penyebaran data yang digunakan adalah kuesioner

Saran dan Implikasi Penelitian

1. Memperluas lingkup penelitian seperti melakukan penelitian terhadap beberapa kota untuk hasil uji yang bisa digeneralisasikan
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah sampel atau beberapa faktor-faktor lain guna untuk diperoleh hasil penelitian yang lebih seperti rasio kecukupan dana untuk melihat seberapa besar kemampuan pegawai, kejujuran dan variabel lain dalam penelitian
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel bersifat primer yang berasal dari kuesioner atau wawancara kesejahteraan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba. Jakarta
- Alatas. 1987. Korupsi, sifat, sebab dan fungsi. LP3ES :Jakarta.
- Almilia, L.S. dan D.Sulistiyowati. (2007). Analisa Terhadap Relevansi Nilai Laba, Arus Kas Operasi dan Nilai Buku Ekuitas Pada Periode Disekitar Krisis Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. Proceeding Seminar Nasional.FE Universitas Trisakti, Jakarta.
- Amin Widjaya Tunggal, 2000, *Manajemen Audit Suatu pengantar*, Rineka Cipta,. Jakarta
- Amiruddin 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.8/No.1: 026-037.
- Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati 2010. Perpajakan Indonesia “Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis”. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2009. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo. Jakarta
- Andrei Shleifer; Robert W. Vishny, 1993, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 108, No. 3. (Aug., 1993), pp. 599-617.
- Anggraeni, Intan Yunintyas, Naili Farida, dan Saryadi 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Diponegoro Journal of Social and Politic.
- Ardyanto. Donny. 2002. Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam Basyaib. H..dkk. (ed.) 2002. Mencuri Uang rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia. Buku 2 Jakarta: Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Keempat. Jakarta: Rineka Cipta
- Asfiah. 2010. Pengertian Budaya Organisasi. <http://nurulasfiah.staff.umm.ac.id/2010/03/13/pengertian-budaya-organisasi>. (Diakses tanggal 25 Maret 2012, pukul 22.00)
- Association of Certified Fraud Examiners. 2006, Report to Nation on Occupational Fraud & Abuse. The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Bafadal, Arif Kamar. 2011. Mengapa Pilihan Jatuh pada Partial Least Square?. <http://arifkamarbafadal.wordpress.com/2011/08/24/mengapa-pilihan-jatuh-pada-partial-least-square>.

*) Laily Rahmawati, Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

**) Maslichah, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

***) M. Cholid Mawardi, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA